

MAKNA STRATEGIS KAJIAN WILAYAH ASIA TENGGARA DARI SUDUT PANDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Amelia Joan Liwe
Universitas Pelita Harapan
amelia.liwe@uph.edu

ABSTRACT

Although the promotion of Southeast Asian Studies is one of the main objectives in the establishment of ASEAN, most major works of Southeast Asian Studies that define this region emerge outside of Southeast Asia. From an international relations perspective, particularly constructivism, identity and knowledge construction have strategic meaning. By reviewing the literature, this paper will (i) explain what Southeast Asian Studies is as an academic field, and (ii) analyze the strategic meaning of Southeast Asian Studies from an International Relations perspective.

Keywords: Southeast Asian Studies, International Relations, constructivism, construction of knowledge

I. Pendahuluan

Pada tanggal 8 Agustus 1967 lima menteri luar negeri dari sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara menandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN. Momentum ini menjadi awal mula berdirinya *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) atau Perkumpulan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pendiri ASEAN tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.

Diperlukan beberapa dekade untuk merangkul semua negara di Asia Tenggara untuk bersatu di bawah payung ASEAN. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Viet Nam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Hal ini disebabkan oleh proses panjang dekolonisasi dan konflik bersenjata antara di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang belum selesai hingga akhir Perang Dingin.

Seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN tahun 1967, organisasi regional ini memiliki tujuh tujuan inti yang

menekankan kerja sama dan percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya serta usaha-usaha stabilitas dan perdamaian regional serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu dari tujuh tujuan inti ini adalah butir keenam yang secara tegas mengamanatkan penggalakan Kajian Wilayah Asia Tenggara.

Sekalipun promosi atau penggalakan Kajian Wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu mandat dalam pembentukan ASEAN, pengembangan Kajian Wilayah Asia Tenggara di kawasan ini sangat lambat dibandingkan usaha serupa di Amerika Serikat, Eropa dan Australia. Hal ini dibuktikan dari kurangnya institusi yang menawarkan Kajian Wilayah Asia Tenggara sebagai sebuah konsentrasi atau program studi di kawasan ini. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun Kajian Wilayah Asia Tenggara sejak 1950an. Tidak heran, banyak kajian berpengaruh mengenai Asia Tenggara diciptakan dari luar kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Akibatnya, pemahaman mengenai Asia Tenggara dan pembentukan identitas kawasan sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari luar kawasan Asia Tenggara.

Untuk menggalakkan diskusi dan perdebatan ilmiah mengenai kajian wilayah khususnya Kajian Wilayah Asia Tenggara, makalah ini menyorot dua pertanyaan yang saling terkait: (i) apa itu Kajian Wilayah Asia Tenggara? dan (ii) apa makna strategis Kajian Wilayah Asia Tenggara dalam hubungan internasional khususnya dari sudut pandang konstruktivisme? Penelitian ini masih bersifat eksploratif dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

II. Wilayah Asia Tenggara

Secara umum, kawasan atau wilayah dunia kerap diartikan sebagai sekumpulan negara yang berdekatan secara geografis dan memiliki interaksi yang intensif satu dengan yang lain, serta memiliki persepsi yang mirip mengenai berbagai fenomena dunia. Russet mendefinisikan kawasan atau wilayah berdasarkan kedekatan geografis dan homogenitas budaya serta sosial serta sikap dan institusi politik yang mirip. Wilayah juga bisa dilihat sebagai strategi utama yang dibentuk oleh koalisi bangsa-bangsa yang hidup berdampingan.¹ Deutsch melihat faktor saling ketergantungan berbagai dimensi dari negara-negara yang berdekatan sebagai penentu terbentuknya wilayah.² Faktor-faktor saling ketergantungan ini dapat berupa transaksi ekonomi, komunikasi, dan nilai-nilai politik. Dengan kata lain, wilayah bukanlah sebuah entitas organik melainkan sebuah bentukan sosial dan politik.

Oleh sebab itu, perlu ada kesadaran kewilayahan yang dibentuk terus-menerus. Kesadaran ini merupakan persepsi dan rasa memiliki yang dibentuk bersama. Biasanya,

¹ Russet, B. M. (1967). *International regions and the international system: A study in political ecology*. Chicago, IL: Rand McNally.

² Deutsch, K. W. (1957). *Political community and the North Atlantic area: International organization in the light of historical experience*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

kesadaran tersebut terbentuk atau dimungkinkan oleh faktor-faktor internal yang sama seperti budaya, sejarah, dan tradisi agama. Faktor-faktor eksternal juga dapat mendorong terciptanya kesadaran wilayah. Ancaman politik, sebagai contoh, dapat menyatukan persepsi dan membangkitkan kesadaran wilayah. Tantangan budaya dari luar juga dapat mendorong rasa kebersamaan.

Secara geografis, kawasan yang disebut sebagai Asia Tenggara merupakan wilayah yang berada di antara wilayah Asia Selatan dan Asia Timur. Wilayah Asia Tenggara dapat dibagi menjadi dua sub-wilayah yang memiliki beberapa ciri khas geografis yang mirip. Yang pertama, Asia Tenggara Daratan (*Mainland Southeast Asia*) yang meliputi negara Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Wilayah ini menempati daratan benua Asia. Yang kedua, Asia Tenggara Kepulauan (*Islands or Maritime Southeast Asia*) yang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei dan Singapura.

Akan tetapi, kawasan atau wilayah Asia Tenggara hampir tidak memiliki kesamaan budaya, agama maupun sejarah yang menyatukan sehingga layak disebut sebagai satu wilayah. Secara budaya, kawasan ini sangat beragam. Ada ribuan budaya lokal yang tumbuh subur dan berevolusi di kawasan ini. Pengaruh budaya Sanskerta atau India, Cina, dan Eropa juga kental di Asia Tenggara dan kerap kali telah mengalami pembauran sedemikian rupa dengan elemen budaya yang lain sehingga menciptakan kekhasan tersendiri. Rabindranath Tagore, penulis India yang terkenal, pernah melakukan perjalanan lintas Asia Tenggara untuk membuktikan sendiri pengaruh India atau budaya Sanskerta yang konon kuat sekali di kawasan ini. Setelah kunjungan tersebut, Tagore berkata, “*I see India everywhere but find it nowhere*” (Tagore, 2010. Lihat juga ISEAS, 2009).

Akulturasasi di kawasan ini telah terjadi selama ratusan tahun. Kawasan ini juga memiliki agama yang beragam. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sementara Filipina merupakan masyarakat Katolik terbesar di Asia. Thailand menjadi salah satu pusat perkembangan Theravada Budha sementara Vietnam menganut kepercayaan Budha dengan tradisi Mahayana.

Kawasan ini mungkin memiliki kesamaan pengalaman sejarah penjajahan. Semua bangsa di Asia Tenggara kecuali Thailand pernah dijajah oleh kekuatan-kekuatan besar Eropa. Perancis menguasai daerah yang dulu disebut sebagai Indocina. Bagian Asia Tenggara tersebut sekarang menjadi tiga negara yang merdeka dan berdaulat, Vietnam, Kamboja dan Laos. Inggris menguasai wilayah yang sekarang menjadi Malaysia dan Singapura sementara Myanmar dulunya menjadi bagian kekuasaan imperial Inggris di India dan sekitarnya. Belanda menjajah Indonesia sementara Spanyol dan kemudian Amerika Serikat pernah menduduki Filipina.

Keberagaman itu sendiri mungkin menjadi elemen yang menyatukan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, solidaritas sebagai negara-negara kecil dan menengah yang pernah terjajah juga menjadi perekat yang lain. Pada dasarnya identitas Kawasan Asia Tenggara merupakan suatu konstruksi sosial dan politik yang pembentukan identitasnya berkembang lebih lambat daripada pembentukan organisasi regional ASEAN.

Ada beberapa alasan yang mungkin bisa dikemukakan. Pertama, usaha pengembangan identitas kawasan atau regional melalui pembentukan ASEAN pada tahun 1967 terjadi bersamaan dengan proses pembentukan identitas nasional semua negara di kawasan ini yang saat itu sedang melewati tahap dekolonisasi dan gerakan nasionalisme anti-penjajahan. Hal ini

menyebabkan pengembangan dan penyebaran identitas nasional seolah-olah menjadi prioritas utama dibandingkan pengembangan identitas kawasan.

Kedua, negara-negara di Asia Tenggara cenderung memiliki hubungan ketergantungan dengan negara-negara di luar kawasan sedangkan hal serupa tidak terjadi dengan negara-negara sekawasan. Filipina, misalnya, memiliki hubungan khusus dengan Amerika Serikat dan negara adidaya ini tetap menjadi orientasi utama masyarakat Filipina. Orientasi ini mungkin juga bagian dari usaha perimbangan kekuasaan negara-negara kecil dan menengah dengan kekuatan besar. Negara-negara di Asia Tenggara pada dasarnya merupakan negara dengan kekuatan menengah bahkan kecil. Di sisi yang lain, karena letaknya yang strategis dalam jalur perdagangan dan pelayaran dunia serta geopolitik dunia, wilayah Asia Tenggara selalu menarik perhatian negara adidaya atau great powers. Dinamika ini sempat menciptakan relasi ketergantungan (*dependence*) antara negara-negara di Asia Tenggara dengan great powers dunia tersebut.

Ketiga, dunia pendidikan sebagai komponen utama pembentukan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Asia Tenggara sangat lambat dalam menanggapi dan membangun Kajian Wilayah Asia Tenggara dari perspektif kawasan ini. Akibatnya identitas kawasan Asia Tenggara yang terbentuk lewat ranah pendidikan lebih banyak diasah oleh cendekiawan-cendekiawan Kajian Asia Tenggara yang berasal dari luar kawasan ini.³ Selama beberapa dekade, pemahaman mengenai

³ Khudi, A. F., & Anugrah, I. (2013). Kajian Asia Tenggara: Antara narasi, teori, dan emansipasi. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(2), 205-228. Retrieved from https://www.academia.edu/6229130/Kajian_Asia_Tengara_Antara_Narasi_Teori_dan_Emansipasi

Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan terbentuk dari studi yang dilakukan oleh berbagai pusat Kajian Asia Tenggara di Amerika Serikat yang memang menyediakan dana cukup besar.⁴ Usaha ini tidak saja memperkaya pengetahuan mengenai Asia Tenggara tetapi juga membentuk ide dan identitas kawasan Asia Tenggara itu sendiri.

III. Kajian Wilayah Asia Tenggara

Pada awalnya, kajian wilayah seolah-olah hanya menjadi kebutuhan praktis angkatan bersenjata atau militer negara adidaya yang akan ditugaskan ke berbagai wilayah dunia selama Perang Dunia II.⁵ Pasca perang tersebut, kebutuhan mereka yang memiliki pengetahuan spesifik mengenai suatu negara tetap ada bahkan semakin meningkat seiring dengan perkembangan Perang Dingin. Universitas Cornell, salah satu *ivy league* di Amerika Serikat, bahkan merintis proyek khusus yang mengumpulkan segala macam materi tentang Indonesia dan membuat berbagai kajian mengenai Asia Tenggara khususnya Indonesia.

Pada tahun 1952, UNESCO membentuk panel khusus para ahli untuk membahas apa itu kajian wilayah. Duroselle mendefinisikan kajian wilayah sebagai kajian ilmiah mengenai sebuah wilayah atau kawasan yang memiliki kesatuan sosial politik dengan tujuan untuk memahami dan

menjelaskan posisi dan peran kawasan tersebut dalam masyarakat internasional.⁶ Hal ini hanya dapat dicapai melalui pendekatan interdisiplin yang relevan dan menyajikan penjelasan yang valid.

Hans Morgenthau menegaskan bahwa secara historis maupun analitik, kajian wilayah merupakan salah satu bagian pengetahuan dalam Ilmu Hubungan Internasional. Menurut Morgenthau, salah satu permasalahan utama pendekatan dalam kajian wilayah dibandingkan dengan ilmu hubungan internasional adalah pada ide universal versus spesifik. Sekalipun sebuah wilayah memiliki keunikan budaya tersendiri, fenomena yang terjadi pada kawasan tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah dan memiliki pola universal yang dapat berguna dalam memperkaya ilmu hubungan internasional.⁷

Dengan mengambil pemahaman tersebut di atas, Kajian Wilayah Asia Tenggara dapat diartikan sebagai studi atau kajian interdisipliner mengenai kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang relevan dengan tujuan membangun pemahaman dan penjelasan mengenai masyarakat, budaya, sistem sosial politik serta dinamika wilayah Asia Tenggara, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri maupun dengan kekuatan di luar wilayah tersebut. Penekanan atau sudut pandang kajian harus mengambil sudut pandang kawasan sehingga pemahaman mengenai wilayah tersebut menjadi semakin kuat.

Dalam hal ini, pemahaman budaya termasuk keterampilan bahasa Asia Tenggara menjadi modal dasar dalam pengembangan Kajian Wilayah Asia Tenggara. Menurut Joseph Nye budaya

⁴ Acharya, A. (2012). *The making of Southeast Asia: International relations of a region*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.; Winichakul, T. (2014). Asian studies across academies. *The Journal of Asian Studies*, 73(4), 879-897. <https://doi.org/10.1017/s0021911814001065> ; Woo, P. S., & King, V. T. (2013). *The historical construction of Southeast Asian studies: Korea and beyond*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789814414593-009>

⁵ Morgenthau, H. J. (1952). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York, NY : Alfred A. Knopf.

⁶ Duroselle, J. B. (1952). Area studies: Problems of method. *International Social Science Bulletin*, 4(4), 636-646. Retrieved from

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000059694>

⁷ Morgenthau, H. J. (1952).

merupakan sekumpulan nilai dan praktek yang memberikan makna bagi sebuah masyarakat yang biasanya termanifestasikan dalam sastra, seni, pendidikan, film, musik dan makanan.⁸ Budaya akan selalu berimbas pada kebijakan yang dibuat sebuah negara. Jika budaya negara tersebut memiliki nilai universal, dan nilai tersebut dipancarkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk kebijakan luar negeri, negara tersebut akan mendapatkan simpati yang lebih luas dalam sistem internasional sehingga keluaran yang diharapkan dapat tercapai. Penyebaran budaya maupun nilai-nilai yang dapat diterima secara universal dapat terjadi melalui interaksi pribadi, kunjungan, perdagangan, maupun lewat ilmu pengetahuan.

Makna budaya ini diproduksi dan dipertukarkan. Menurut Stuart Hall ada berbagai cara produksi dan pertukaran makna budaya ini, seperti: (1) identitas kelompok dan perbedaan kelompok; (2) interaksi personal dan sosial; (3) media massa dan komunikasi-komunikasi global; (4) ritual-ritual dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari; (5) narasi-narasi, cerita-cerita, dan fantasi-fantasi; dan (6) aturan-aturan, norma-norma, dan konvensi-konvensi.⁹ Ilmu pengetahuan seperti Kajian Wilayah Asia Tenggara, dan lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam produksi dan pertukaran makna tersebut.

Pada awalnya, Kajian Wilayah Asia Tenggara berkembang pesat di Amerika Serikat karena kepentingan Perang Dingin. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana yang cukup besar pada tahun 1950an dan 1960an untuk menciptakan pusat-pusat Kajian Asia Tenggara dan mengembangkan

studi ini. Asumsinya adalah bahwa kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara post-kolonial yang baru lahir di Asia Tenggara pada dasarnya bisa sejalan. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam serta diiringi rasa simpati terhadap kawasan tersebut akan membawa Amerika Serikat dan kawasan tersebut lebih dekat sehingga kepentingan bersama dapat terwujud.¹⁰

Seiring dengan peningkatan intensitas arus globalisasi dan pergeseran dinamika kekuatan internasional pasca Perang Dingin, pengembangan kajian wilayah di dunia khususnya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, pengembangan kajian wilayah di perguruan tinggi terbentur masalah pendanaan. Ini masalah klasik yang tentu saja tidak hanya menimpa nasib kajian wilayah tetapi juga disiplin ilmu yang lain. Hal ini tentu saja berimbas pada kehadiran masalah kedua yaitu sedikitnya ahli kajian wilayah. Situasi ini ibarat mempertanyakan mana yang lebih dahulu hadir, ayam atau telur. Ahli kajian wilayah tidak mungkin bertambah jika tidak ada program di perguruan tinggi yang mengembangkan kajian wilayah. Masalah yang lebih mendasar adalah pertanyaan mengenai relevansi kajian wilayah dewasa ini. Pertanyaan seperti sejauh mana kajian wilayah masih dianggap penting untuk menjelaskan dinamika regional dan internasional merupakan contoh dari sekian kegamangan pengembangan kajian wilayah.

Krisis ekonomi juga ikut memberikan dampak pada perkembangan Kajian Wilayah Asia Tenggara. Sebagian besar pusat Kajian Asia Tenggara di Amerika Serikat mengalami penurunan

⁸ Nye, J. S. (2009). *Soft power: The means to success in world politics*. New York, NY: PublicAffairs.

⁹ Hall, S. (Ed.). (2003). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London, England: SAGE Publications.

¹⁰ McVey, R. (1995). Change and continuity in Southeast Asian studies. *Journal of Southeast Asian Studies*, 26(1), 1-9.
<https://doi.org/10.1017/s0022463400010432>

jumlah kegiatan dan pengajar.¹¹ Penurunan di belahan dunia barat ini menciptakan peluang di belahan timur yang justru mengalami peningkatan ekonomi. Sebagai contoh, salah satu asosiasi Kajian Asia terbesar dunia yang berkedudukan di Amerika Serikat, merintis konferensi tahunan baru di Asia (www.asian-studies.org). Berbagai kalangan mulai melihat potensi pengembangan Kajian Wilayah Asia Tenggara di kawasan Asia Tenggara sendiri. Salah satu pusat kajian yang paling aktif dalam usaha pembentukan pengetahuan ini adalah Singapura.¹²

Ironisnya, Indonesia sebagai negara terbesar di wilayah Asia Tenggara, agak terlambat dalam membangun Kajian Wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 2017, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan temu ilmiah nasional untuk membahas pengembangan kajian wilayah secara kritis dan mempertemukan semua pemangku kepentingan termasuk wakil dari pemerintah, khususnya departemen luar negeri, sejumlah perguruan tinggi yang mengembangkan kajian wilayah, dan lembaga penelitian independen serta *think tank* di Indonesia. Keprihatinan seperti yang dikemukakan di atas mengemuka dan dibahas dalam pertemuan tersebut. LIPI juga menyelenggarakan ceramah publik secara berkala selama satu tahun. Topik-topik yang dipilih berhubungan dengan beragam isu di Asia Tenggara. Para pembicara yang diundang merupakan ahli Kajian Wilayah Asia Tenggara.

¹¹ Winichakul, T. (2014). Asian studies across academies. *The Journal of Asian Studies*, 73(4), 879-897. <https://doi.org/10.1017/s0021911814001065>

¹² Chou, C., & Houben, V. (2006). *Southeast Asian studies: Debates and new directions*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789812306517-002>

IV. Makna Strategis Kajian Wilayah Asia Tenggara dalam Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional lahir dari kebutuhan praktis sistem internasional yaitu mencegah perang dan menjaga perdamaian dunia. Setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang belum tentu sejalan dengan yang lain. Setiap negara juga memiliki kekuatan atau kapasitas yang berbeda dengan negara lainnya. Situasi ini melahirkan kebutuhan untuk membangun pengetahuan mengenai makna kepentingan-kepentingan yang beragam ini dan berbagai kemungkinan mekanisme internasional yang yang dapat digunakan sehingga kepentingan yang beragam ini masih dapat hidup berdampingan secara damai.

Konstruktivisme merupakan suatu teori utama dalam Hubungan Internasional yang mampu menjelaskan bagaimana makna identitas dan nilai-nilai dibentuk dan disebarluaskan masyarakat internasional. Prinsip utama dari konstruktivisme adalah bahwa manusia menanggapi sebuah obyek, termasuk wilayah dan arti wilayah tersebut, berdasarkan makna yang dilekatkan pada obyek atau wilayah tersebut.¹³ Ini artinya bahwa tidak ada makna obyektif dari sebuah obyek atau wilayah. Yang ada adalah pemaknaan dan proses pemaknaan terus-menerus oleh mereka yang berhubungan dengan sebuah obyek atau wilayah atau oleh mereka yang menemukan relevansi sebuah obyek atau wilayah dengan dirinya.

Prinsip kedua konstruktivisme adalah bahwa makna dibentuk dari proses interaksi antar manusia.¹⁴ Proses penafsiran yang lahir dari interaksi ini membentuk makna intersubyektifitas. Jika proses ini diperkuat seiring berjalannya waktu, interaksi tersebut akan menciptakan

¹³ Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391-425. <https://doi.org/10.1017/s0020818300027764>

¹⁴ Wendt, A. (1992).

pemahaman tertentu mengenai satu dengan yang lain. Jika proses tersebut berulang dalam jangka waktu yang cukup panjang, mereka yang terlibat akan mulai memahami sikap satu dengan yang lain khususnya sikap terhadap sebuah isu tertentu. Hal ini akan mendorong penyesuaian perilaku antar mereka.¹⁵ Dalam konteks hubungan internasional, konflik bahkan perang dapat dihindari jika masyarakat internasional terus membentuk dan mengkomunikasikan makna-makna universal yang relevan dalam kehidupan internasional bersama. Hal yang sama berlaku pada usaha menciptakan perdamaian.

Konstruktivisme memberikan penekanan pada unsur identitas. Identitas itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah pemahaman tertentu mengenai diri sendiri dan peran serta harapan mengenai diri sendiri yang didapat melalui interaksi sosial dalam masyarakat. Identitas biasanya lebih stabil walaupun mungkin berubah seiring berjalannya waktu.¹⁶ Melalui proses sosial atau sosialisasi, identitas mereka yang terlibat akan terbentuk dan dipahami oleh satu dengan yang lain.¹⁷ Identitas bersifat “relational” karena identitas selalu berhubungan dengan konstruksi sosial tertentu.¹⁸ Seorang individu memiliki banyak identitas yang berhubungan dengan peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Misalnya, seseorang memainkan peran sebagai anak perempuan dalam hubungannya dengan orang tua, tetapi peran seorang kakak dalam hubungannya dengan adik-adik. Jika menikah, ia akan memiliki identitas dan peran lain sebagai istri tanpa menghilangkan perannya yang lain. Dalam konteks kehidupan bernegara, ia

adalah seorang warga negara dengan segala atribut dan peran yang dilekatkan pada identitas tersebut.

Alexander Wendt berpendapat bahwa identitas merupakan basis dari kepentingan. Sebuah entitas tidak memiliki kepentingan yang sudah ada atau ditentukan sebelumnya yang terlepas dari konteks sosial. Menurut Wendt, kepentingan lahir dari konteks sosial.¹⁹ Dalam konteks hubungan internasional, Martha Finnemore menjelaskan bahwa norma-norma masyarakat internasional mempengaruhi identitas dan kepentingan negara. Sementara norma-norma lahir dari ide mengenai keyakinan intersubjektifitas yang beredar secara luas antar negara.²⁰ Norma-norma ini dapat disebarluaskan oleh individu, negara atau organisasi internasional.²¹ Norma-norma ini akan mengasah kebijakan yang diambil pembuat kebijakan sesuai dengan apa yang mereka percaya mengenai kepentingan negara.

Wilayah Asia Tenggara sudah membentuk diri sebagai sebuah kawasan yang memiliki identitas sendiri. Karena identitas kawasan ini tidak bersifat alami, penting sekali untuk terus berpartisipasi dalam pembentukan, negosiasi, maupun evolusi identitas kawasan ini. Seperti telah dikemukakan di atas, pembentukan identitas kawasan ini berlangsung lebih lambat daripada pembentukan berbagai institusi politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Organisasi regional seperti ASEAN bahkan mencoba mempercepat proses regionalisme kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, pembentukan ASEAN pada tahun 1967 dapat dilihat sebagai usaha awal

¹⁵ Wendt, A. (1992).

¹⁶ Wendt, A. (1992).

¹⁷ Berger, P. (1966). Identity as a problem in the sociology of knowledge. *European Journal of Sociology*, 7(1), 105-115.

<https://doi.org/10.1017/s0003975600001351>

¹⁸ Berger, P. (1966).

¹⁹ Wendt, A. (1992).

²⁰ Jackson, J., & Sorensen, G. (2006). *Introduction to international relations: Theories and approaches* (3rd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.

²¹ Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887-917.

<https://doi.org/10.1162/002081898550789>

pembentukan identitas kawasan walaupun saat itu ASEAN hanya beranggotakan lima negara. Tentu saja, bagi mereka yang lebih pesimis, pembentukan organisasi regional ini sering dihubungkan pada kepentingan Perang Dingin saat itu.²²

Sekalipun demikian, ASEAN terus bertahan bahkan sampai Perang Dingin selesai. Setelah transisi dalam politik global tersebut terjadi, ASEAN bahkan mampu mengembangkan keanggotaannya dengan merangkul seluruh negara yang berada di kawasan ini. Walaupun demikian, identitas wilayah masih terus diupayakan misalnya dengan diluncurkannya identitas Masyarakat ASEAN yang salah satunya dengan usaha pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai berjalan sejak 2015.

Sekalipun terdapat berbagai kemajuan dalam ranah kebijakan, pengetahuan mengenai kawasan ini masih banyak terbentuk dari luar Asia Tenggara. Bahkan, selama beberapa dekade, pemahaman mengenai Asia Tenggara sebagai sebuah wilayah banyak terbentuk dari studi yang dilakukan oleh berbagai pusat Kajian Asia Tenggara di Amerika Serikat yang memang menyediakan dana cukup besar.²³ Usaha ini tidak saja memperkaya pengetahuan mengenai Asia Tenggara tetapi juga membentuk ide dan identitas kawasan Asia Tenggara itu sendiri.

V. Kesimpulan

Kajian Asia Tenggara tidak hanya membentuk pengetahuan mengenai kawasan Asia Tenggara tetapi juga membentuk identitas kawasan ini melalui proses interaksi antara akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Selama beberapa dekade, Kajian Asia Tenggara

banyak terpusat di Amerika Serikat, tetapi memasuki abad ke 21, sejumlah pusat kajian di kawasan Asia Tenggara khususnya di Singapura mulai secara aktif terlibat dalam pembentukan pengetahuan tersebut.

Untuk melengkapi penelitian ini, penelitian tahap kedua sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri dan menelaah perkembangan Kajian Asia Tenggara di luar dan di dalam kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Selain itu, penelitian tahap kedua akan mencari tahu mengapa perkembangan Kajian Asia Tenggara di kawasan Asia Tenggara tidak mengalami perkembangan semaju usaha serupa di kawasan lain.

²² Acharya, A. (2012). *The making of Southeast Asia: International relations of a region*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

²³ Winichakul, T. (2014).;

Woo, P. S., & King, V. T. (2013).

REFERENCES

- Acharya, A. (2012). *The making of Southeast Asia: International relations of a region*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Berger, P. (1966). Identity as a problem in the sociology of knowledge. *European Journal of Sociology*, 7(1), 105-115. <https://doi.org/10.1017/s0003975600001351>
- Chou, C., & Houben, V. (2006). *Southeast Asian studies: Debates and new directions*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789812306517-002>
- Deutsch, K. W. (1957). *Political community and the North Atlantic area: International organization in the light of historical experience*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Duroselle, J. B. (1952). Area studies: Problems of method. *International Social Science Bulletin*, 4(4), 636-646. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000059694>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887-917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Hall, S. (Ed.). (2003). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London, England: SAGE Publications.
- Jackson, J., & Sorensen, G. (2006). *Introduction to international relations: Theories and approaches* (3rd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.
- Khudi, A. F., & Anugrah, I. Kajian Asia Tenggara: Antara narasi, teori, dan emansipasi. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(2), 205-228. Retrieved from https://www.academia.edu/6229130/Kajian_Asia_Tenggara_Antara_Narasi_Teori_dan_Emansipasi
- Morgenthau, H. J. (1952). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Nye, J. S. (2009). *Soft power: The means to success in world politics*. New York, NY: PublicAffairs.
- McVey, R. (1995). Change and continuity in Southeast Asian studies. *Journal of Southeast Asian Studies*, 26(1). <https://doi.org/10.1017/s0022463400010432>
- Russett, B.M. (1967). *International regions and the international system: A study in political ecology*. Chicago, IL: Rand McNally.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391-425. <https://doi.org/10.1017/s0020818300027764>
- Winichakul, T. (2014). Asian studies across academies. *The Journal of Asian Studies*, 73(4), 879-897. <https://doi.org/10.1017/s0021911814001065>
- Woo, P. S., & King, V. T. (2013). *The historical construction of Southeast Asian studies: Korea and beyond*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789814414593-009>